

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu)

Andi Renandi¹, Suyeno², Langgeng Rachmatullah Putra³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

Email: andirenandi987@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur Desa adalah menjadi inti perhatian dalam rencana pengembangan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, memperkuat kemandirian desa, dan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan pembangunan desa sering kali menemui banyak tantangan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil yang dicapai. Melalui pendekatan ini, studi bertujuan meninjau kebijakan pembangunan desa serta mengecek sejauh mana kebijakan itu telah diimplementasikan sejalan berdasarkan sasaran yang direncanakan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode evaluasi kebijakan publik. Analisis evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh melalui tanya jawab/wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen tentang perencanaan beserta pelaksanaan pembangunan pengembangan desa. Temuan melalui penelitian menunjukkan bahwa secara umum, kebijakan pembangunan desa telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan infrastruktur serta aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, masih ada beberapa masalah yang dihadapi, seperti kapasitas aparatur desa yang terbatas, partisipasi masyarakat yang belum maksimal, dan ketidakmerataan manfaat pembangunan yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, aspek keberlanjutan dan ketepatan target program pembangunan juga perlu diperbaiki.

Kata kunci: pembangunan desa, evaluasi kebijakan, kebijakan publik, kesejahteraan masyarakat.

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan elemen fundamental dalam strategi pembangunan nasional karena desa menjadi basis utama kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Berbagai kebijakan pembangunan desa telah diluncurkan melalui tindakan pemerintah yang dirancang dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat seperti kesenjangan wilayah. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut sering kali menghadapi kendala struktural dan kultural yang menyebabkan tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Kebijakan ini secara normatif diharapkan mampu mendorong kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa berhasilnya pembangunan di Desa bukan karena dilihat pada besarnya alokasi anggaran, melainkan juga oleh kualitas kebijakan dan strategi implementasinya. Dalam praktiknya, kebijakan pembangunan desa sering kali menghadapi persoalan perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat, lemahnya kapasitas aparatur desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kondisi tersebut menyebabkan hasil pembangunan belum sepenuhnya memberikan dampak yang merata dan berkelanjutan. Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, merupakan salah satu desa yang secara aktif melaksanakan program pembangunan desa dengan penggunaan anggaran Dana Desa dengan Alokasi Dana Desa. Berbagai program pembangunan telah direalisasikan, terutama pada sektor infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta program sosial seperti bantuan pendidikan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan kesenjangan antara tujuan kebijakan pembangunan desa dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Beberapa kebutuhan dasar masyarakat, seperti pemerataan infrastruktur, optimalisasi potensi ekonomi lokal, serta keberlanjutan program pembangunan, belum sepenuhnya terpenuhi.

Kesenjangan antara konsep teoritis pembangunan desa dan praktik implementasi kebijakan tersebut menunjukkan pentingnya dilakukannya evaluasi kebijakan pembangunan desa. Selain menilai keberhasilan,

evaluasi kebijakan bertujuan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi implementasi dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di masa depan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan pembangunan desa di Desa Katua dengan menggunakan perspektif evaluasi kebijakan publik. Hasil penelitian diintensikan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian kebijakan publik di tingkat desa dan menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah desa serta *stakeholder* untuk merumuskan kebijakan pembangunan desa yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Pembangunan Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Kebijakan Pembangunan Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan kebijakan pembangunan Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
2. Untuk dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat kebijakan pembangunan Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis. Bagi instansi terkait, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi instansi terkait serta dapat memberikan kontribusi dalam Kebijakan PembangunanPembangunan.
2. Manfaat Praktis. Bagi Masyarakat, Penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan masukan bagi masyarakat di dalam melakukan Kebijakan PembangunanPembangunan di Desa Katua.

Tinjauan Pustaka

Weimer & Vining (1992:1) dalam Intan Fitri Meutia, Ph.D., memaparkan analisis kebijakan merupakan nasihat dengan berorientasi terhadap pelanggan baik relevan dalam keputusan-keputusan publik yang didasarkan atas nilai-nilai sosial.

Teori evolusi pembangunan memandang pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang berlangsung secara bertahap, dari pendekatan tradisional menuju pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

William N. Dunn mengemukakan enam kriteria utama dalam evaluasi kebijakan publik, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas, serta ketepatan (*appropriateness*). Semua kriteria tersebut dipakai dalam menilai kualitas kebijakan secara komprehensif.

Kebijakan Publik dan Pembangunan Desa

Kebijakan publik merupakan rangkaian dari keputusan dan tindakan untuk dirumuskan dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik dengan mencapai tujuan khusus. Dalam konteks pembangunan desa, kebijakan publik diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi lokal, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa. Kebijakan pembangunan desa tidak untuk berorientasi dalam pertumbuhan ekonomi, serta dapat melihat dan memperhatikan dimensi sosial, lingkungan, berserta keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan desa menjadi semakin strategis sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai karakteristik lokal. Oleh karena itu, keberhasilan Pembangunan desa sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan dan efektivitas implementasinya di tingkat desa.

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa

Evaluasi kebijakan merupakan instrumen penting untuk menilai bagaimana tingkat kebijakan dalam mencapai tujuan yang ditentukan serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasinya. Evaluasi kebijakan pembangunan desa dibutuhkan dalam memastikan atas kebijakan yang dirumuskan sungguh-sungguh dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, evaluasi kebijakan pembangunan desa dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria utama, yaitu efektivitas, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan pembangunan desa. Pemerataan menekankan pada distribusi manfaat pembangunan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Responsivitas mengukur kemampuan pemerintah desa dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara itu, ketepatan berkaitan dengan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat desa.

Penggunaan kriteria evaluasi tersebut memungkinkan analisis kebijakan pembangunan desa

dilaksanakan dengan komprehensif, bukan untuk menilai output pembangunan, melainkan dampak dan relevansinya bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan dengan asumsi memungkinkan peneliti dalam memahami keseluruhan mendalam proses implementasi kebijakan pembangunan desa dan dinamika sosial yang ada pada masyarakat.

Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan pembangunan desa yang meliputi program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes, serta program pembangunan sosial.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ada dua yaitu data primer serta data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan aparat pemerintah desa, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, serta warga desa yang terlibat langsung dalam program pembangunan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan tanya jawab/wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Kombinasi teknik tersebut digunakan untuk menambah kedalaman beserta keabsahan data penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilaksanakan dengan penggunaan model analisis interaktif terdiri reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan kriteria evaluasi kebijakan pembangunan desa. Proses analisis dilaksanakan dengan cara berulang sampai didapatkan kesimpulan valid serta komprehensif.

Keabsahan Data

Keabsahan data didapat dari teknik triangulasi sumber beserta metode. Triangulasi dilakukan dari perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Kebijakan Pembangunan Desa

Hasil penelitian diperoleh kebijakan pembangunan desa di Desa Katua telah memadai/efektif dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan dan fasilitas pelayanan masyarakat. Pembangunan infrastruktur tersebut memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi warga. Selain itu, kebijakan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes juga mulai memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa, meskipun belum berjalan secara optimal.

Namun demikian, efektivitas kebijakan pembangunan desa masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pengelolaan dan keberlanjutan program. Beberapa program pembangunan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan karena keterbatasan kapasitas aparat desa dan lemahnya sistem perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat.

Pemerataan Manfaat Pembangunan

Dari aspek pemerataan, hasil penelitian diperoleh keuntungan pembangunan desa tidak sepenuhnya merata di seluruh masyarakat. Pembangunan infrastruktur masih terkonsentrasi terhadap wilayah khusus, sementara beberapa dusun belum memperoleh akses pembangunan yang sama. Kondisi itu menerangkan pentingnya perencanaan pembangunan desa agar lebih inklusif serta berorientasi pada keadilan sosial.

Responsivitas Pemerintah Desa

Responsivitas pemerintah desa dalam merespons kebutuhan masyarakat tergolong cukup baik, terutama melalui mekanisme musyawarah desa. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan program pembangunan. Namun, tidak semua aspirasi Masyarakat bisa adaptasi dalam program pembangunan desa, sehingga menimbulkan persepsi bahwa sebagian kebijakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Ketepatan Program Pembangunan Desa

Dari sisi ketepatan, sebagian program pembangunan desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

terutama pada sektor infrastruktur dan pendidikan. Program bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu dinilai tepat sasaran serta bermanfaat sepenuhnya terhadap masyarakat. Namun, beberapa rencana pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya berbasis potensi lokal, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terbatas.

Faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan pembangunan Desa Katua meliputi tingginya semangat gotong royong masyarakat serta ketersediaan sumber daya alam yang potensial untuk dikelola lebih lanjut. Namun, di sisi lain, proses pembangunan masih menghadapi beberapa hambatan signifikan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam anggaran yang sering kali belum mencukupi untuk mengakomodasi seluruh usulan kebutuhan dusun yang kompleks. Selain itu, fluktuasi kondisi ekonomi dan minimnya kemitraan dengan pihak swasta menjadi tantangan tambahan yang mengharuskan pemerintah desa untuk lebih kreatif dalam mencari solusi pendanaan mandiri dan peningkatan kapasitas perangkat desa.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kebijakan pembangunan desa telah mengadopsi paradigma pembangunan partisipatif dan berkelanjutan, dalam praktiknya pembangunan desa masih didominasi oleh pendekatan fisik dan administratif. Pembangunan desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional karena rata-rata penduduk Indonesia masih bermukim di wilayah pedesaan. Desa bukan hanya dilihat pada objek pembangunan, tetapi juga untuk subjek dengan potensi sosial, ekonomi, serta kelembagaan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan desa seharusnya dirancang dan diimplementasikan secara komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Todaro, M. P., & Fahri, L. N. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 75-88.
- Fuqoha, F. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Dalam Penetapan Desa Wisata Watu Lawang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 199–217. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.57>
- Rantung, M. I. R. (2024). *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model)*. Penerbit Tahta Media.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabilla, R., & Manulang, Smith, J., & Lee, K. (2022). Policy Strategies for Sustainable Development: Innovations and Challenges. *Journal of Policy Analysis*, 15(3), 45- 62.
- Smith, S. C. (2011). *Economic Development*. Boston: Pearson.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. 2018. *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional)*.
- Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.
- Utomo, S. J., & Satriawan, B. (2017). Strategi pengembangan desa wisata di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. *Jurnal Neo-Bis*, 11(2), 142-153.
- Waruwu, M. H., & Halawa, O. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Hilibadalu Kecamatan Sogae'adu Kabupaten Nias. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1747-1757.
- Windari, W. (2021). Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Produksi Di Pedesaan Community Empowerment Model in Production-Based Local Economic Development Effort in Rural Areas. *Jurnal Agirekstensia*, 20(1), 90–106.
- Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. In *Jurnal Kewarganegaraan* (Vol. 5, Issue 2, pp. 295–302). pdfs.semanticscholar.org. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1465>
- Yunas, N. S., Ramadlan, M. F. S., Damayanti, R., & Wahyudi, T. H. (2024). Penguatan Inklusi Sosial dalam Mendorong Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. *Surya Abdimas*, 8(1), 93-105.